DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA KERJA

2024

PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
NOMOR : P.01/PDLKWS/TU/KEU.0/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK. 36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tentang Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
13. Peraturan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Nomor P.07/PDLKWS/TU/12/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2024.**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2023

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES
NIP. 19690114 199603 1 001

Lampiran
Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Nomor : P.01/PDLKWS/TU/KEU.0/12/2023
Tanggal : 28 Desember 2023

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Peraturan Direktur

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Gambar iii

Pengantar Direktur iv

I. Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi SDM 3

II. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 6
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 6
B. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 32

III. Rencana Kerja Tahun 2024 34
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 34
B. Rencana Kerja Tahun 2024 35
C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2024 36
D. Penguatan Belanja Tahun 2024 (Budget Tagging) 37

IV. Penutup 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	6
Tabel 2.2	Prognosis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	7
Tabel 2.3	Capaian Target Kinerja Terhadap Renstra	7
Tabel 2.4	Status Verifikasi Dokumen RPPLH Daerah Tahun 2023	9
Tabel 2.5	Pelaksanaan FGD Penetapan D3TLH Provinsi	15
Tabel 2.6	Fasilitasi Penetapan D3TLH Daerah	17
Tabel 2.7	Dokumen KLHS Tervalidasi Tahun 2023	20
Tabel 2.8	Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022	32
Tabel 2.9	Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023	33
Tabel 3.1	Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	34
Tabel 3.2	Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024	35
Tabel 3.3	Kerangka Pendanaan	36
Tabel 3.4	Penandaan Anggaran Terkait dengan Perubahan Iklim dan Kegiatan Responsif Gender	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3
Gambar 1.2	Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS	4
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS berdasarkan Kelompok Jabataan Fungsioonal Tertentu	5
Gambar 2.1	Dokumentasi Kegiatan Verifikasi RPPLH Daerah	10
Gambar 2.2	Dokumentasi Kegiatan Pemetaan Ekoregion	11
Gambar 2.3	Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia	11
Gambar 2.4	Peta Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia Skala 1:250.000	12
Gambar 2.5	Dokumen Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH	13
Gambar 2.6	Dokumen Materi Teknis D3TLH Nasional dan 34 Provinsi	14
Gambar 2.7	Kick of Meeting Penyusunan Materi Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah	14
Gambar 2.8	Workshop penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	15
Gambar 2.9	Diseminasi hasil penyusunan materi teknis D3TLH Nasional dan materi teknis D3TLH di 34 Provinsi	16
Gambar 2.10	Dokumen Petunjuk Teknis Monev D3TLH	18
Gambar 2.11	Dokumentasi Kegiatan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	20
Gambar 2.12	Pelaksanaan Asistensi Teknis dan Validasi KLHS Tata Ruang	22
Gambar 2.13	Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS Rencana Pembangunan	23
Gambar 2.14	Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Draft Peraturan Menteri	24
Gambar 2.15	Pelaksanaan Bimbingan Teknis KLHS	25
Gambar 2.16	Tahapan Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS	26
Gambar 2.17	Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS	27
Gambar 2.18	Kondisi Perubahan di Lapangan terkait Pembangunan IKN	28
Gambar 2.19	Dokumentasi Kegiatan Penyusunan KLHS TRHS	29
Gambar 2.20	Dokumentasi Kegiatan Penguatan Tata Lingkungan	30

Pengantar Direktur

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 serta merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor selama satu tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

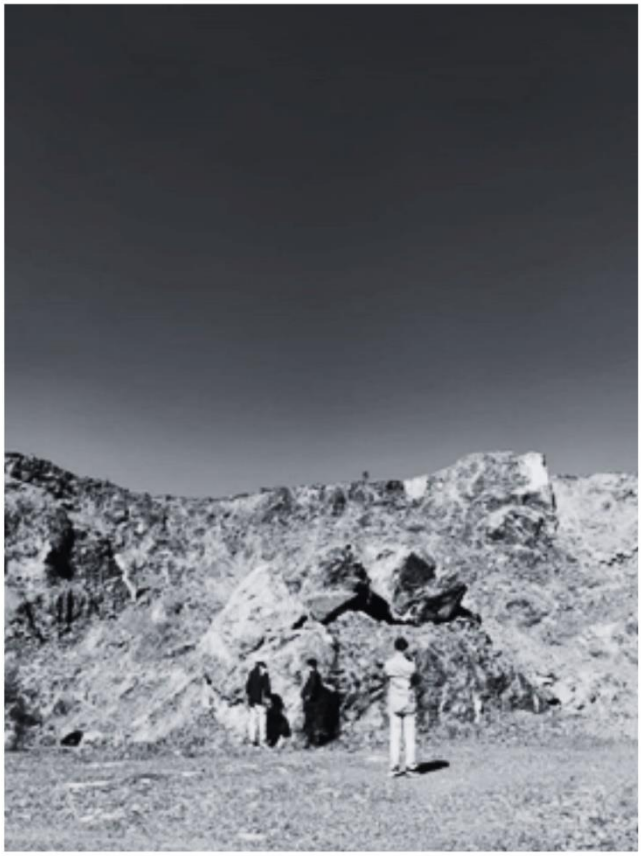

Rencana kerja ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi direktorat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan pada tingkat wilayah maupun sektor yang sudah direncanakan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2023 dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2023

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES
19690114 199603 1 001

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tema rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 yakni "**Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**", terdapat prioritas pembangunan nasional yang didukung oleh tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, yaitu Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan **(Program Prioritas Nasional 1)** dan yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi Dan Lingkungan Hidup **(Program Prioritas Nasional 4).**

Guna mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka sasaran dan indikator yang harus dicapai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

Peran strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam pelaksanaan program planologi kehutanan dan tata lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Sebagai bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan nasional serta tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tujuan penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah untuk :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2022.
2. Memberikan gambaran dari seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PDLKWS mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PDLKWS menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

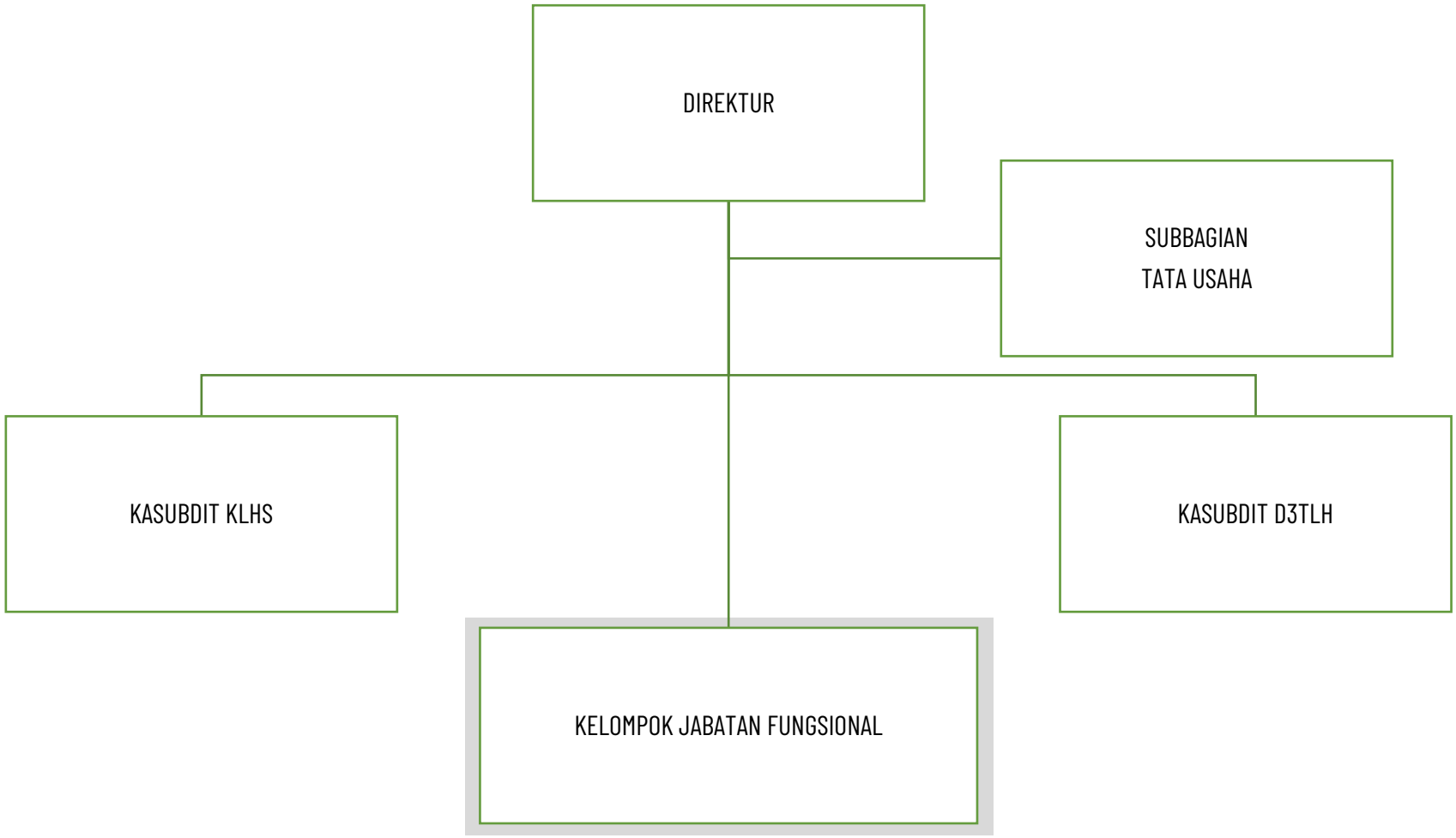

Gambar 1.1 Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021

JUMLAH PEGAWAI

Sampai dengan Desember 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat PDLKWS adalah sebanyak 52 orang yang terdiri dari 27 laki-laki dan 25 perempuan. Komposisi jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan status kepegawaian lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

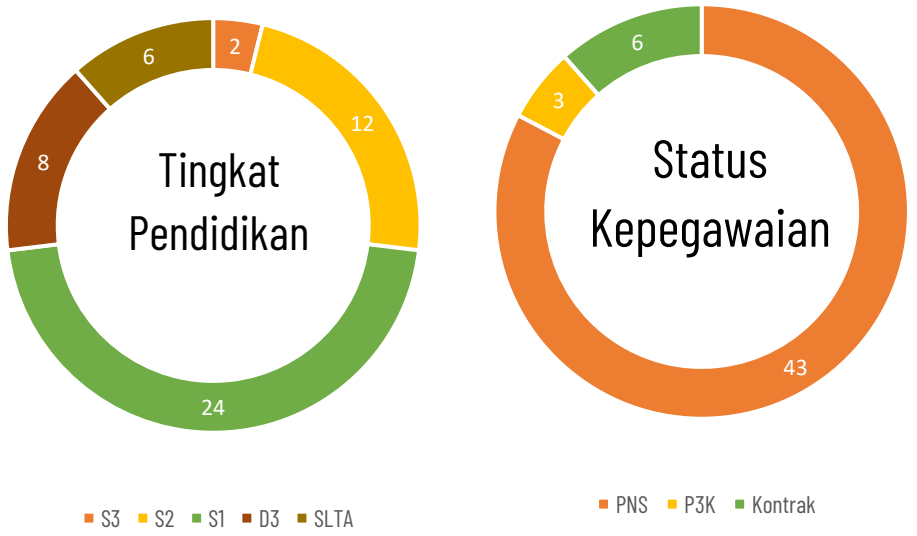

Gambar 1.2 Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

Capaian pelaksanaan unit kegiatan Tahun 2022 merupakan kondisi konkrit yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan unit kegiatan Tahun 2023.

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO.	RO	URAIAN	TARGET		REALISASI			PROGNOSIS		
			VOL.	SATUAN	VOL.	SATUAN	%	VOL.	SATUAN	%
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	7	Rekomendasi Kebijakan	100	7	Rekomendasi Kebijakan	100
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	2	Rekomendasi Kebijakan	2	Rekomendasi Kebijakan	100	2	Rekomendasi Kebijakan	100
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan	100	1	Rekomendasi Kebijakan	100
4	5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeksi Jasa Lingkungan Tinggi	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan	100
5	5436.UBA.001	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100
6	6744.QMA.001	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	100
7	5432.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan	100
8	5432.EBA.964	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan	100

Sumber : Direktorat PDLKWS

Tabel 2. 2 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO.	KODE RO	RO	TARGET	CAPAIAN
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	35 Rekomendasi Kebijakan	35 Rekomendasi Kebijakan
	051. Ekoregion	Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion		
	052. D3TLH	Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH		
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen
4	5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	3 Peta	3 Peta
5	5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	65 Dokumen	65 Dokumen
6	5432.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
7	5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
8	5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	33 Unit	33 Unit
9	5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit

Sumber : Direktorat PDLKWS

Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Terhadap Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 5 TAHUN	SATUAN	REALISASI PERTAHUN					TOTAL REALISASI S/D TAHUN 2023	% REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN
				2020	2021	2022	2023	2024		
Terlaksananya Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS, yang terjamin Kualitasnya	**150**	**Dokumen KLHS**	**21**	**12**	**30**	**65**	**-**	**128**	**85**
	Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN	**1**	**Dokumen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100**
Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan LH	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	**1**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**46**	**-**	**1**	**100**
	Dokumen RPPLH	**35**	**Rekomendasi Kebijakan**	**7**	**7**	**7**	**11**	**-**	**32**	**90**
	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1**	**1**	**1**	**1(35)**	**-**	**1**	**80**
	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1**	**1**	**1**	**1(2)**	**-**	**1**	**80**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 5 TAHUN	SATUAN	REALISASI PERTAHUN					TOTAL REALISASI S/D TAHUN 2023	% REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN
				2020	2021	2022	2023	2024		
Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	**65**	**Juta Hektar**	**65**	**65**	**65**	**65 (3 peta)**	**-**	**65**	**80**
	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	**34**	**Layanan**	**-**	**7**	**7**	**20**	**-**	**0**	**100**
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL, sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi					**-**	**-**	**-**		
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Terlaksana	**5**	**Layanan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**4**	**80**
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Dit PDLKWS Terlaksana	**5**	**Layanan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**4**	**80**
Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen	**5**	**Layanan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**4**	**80**
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan Dukungan Manajemen Dit PDLKWS Terlaksana	**5**	**Layanan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**4**	**80**
			Rata-Rata Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra							**86,25**

Sumber : Direktorat PDLKWS

Dokumen RPPLH

Pada tahun anggaran 2023, Dit. PDLKWS berperan dalam penyusunan NSPK RPPLH Nasional yang termasuk di dalamnya berupa dokumen materi teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rancangan peraturan pemerintah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Target pada tahun anggaran 2023 kelompok kerja RPPLH memiliki target 11 dokumen untuk diselesaikan. Dokumen tersebut berupa 1 dokumen draft materi teknis RPPLH Nasional beserta rancangan peraturan pemerintah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta 10 dokumen verifikasi dan review RPPLH Daerah.

Draft materi teknis RPPLH Nasional merupakan hasil dari diskusi terpusat atau FGD. Draft dokumen ini berisikan potensi dari lima sumberdaya alam yang berpotensi terbarukan, masalah yang ada dikerenakan turunya jasa lingkunan hidup serta upaya dan rencana yang akan dimplementasikan Bersama dengan para pemangku kepentingan baik ditingkat nasional maupun di daerah.

Perkembangan kebijakan RPPLH sendiri dimulai sejak ditetapkannya UU 32 Tahun 2009 hingga sekarang, yang mana pada 2023 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan kebijakan tersebut di antaranya:

- Penyempurnaan Materi Teknis RPPLHN (hasil UUCK), Batang Tubuh RPP PPPLH, Naskah Urgensi dan *Executive Summary*
- Permohonan Keanggotaan PAK kepada K/L terkait
- Permohonan Progsun RPP PPPLH ke Presiden

Metode penyusunan RPP tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan berlandaskan teknokratik, merujuk pada teori dan diskusi dengan para praktisi, akademisi, perwakilan kementerian terkait, pemerintah daerah, dunia usaha serta perwakilan lintas unit kerja di KLHK.

Selain itu, diperlukan koordinasi pembangunan lingkungan hidup di daerah yang melibatkan berbagai sektor dan aktor. Namun, masih ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang juga harus mendapatkan perhatian. Sehingga, peranan dokumen RPPLH Daerah sebagai dokumen pengaman lingkungan hidup menjadi sangat penting.

Dalam rangka percepatan penyusunan RPPLH di daerah maka dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi penyusunan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan dilaksanakan di Jakarta dan/atau di daerah dengan mengundang unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait untuk menjelaskan secara umum proses penyusunan RPPLH Provinsi & Kabupaten/Kota serta hal-hal lain yang perlu dilakukan pemerintah provinsi & kabupaten/kota dalam rangka penyusunannya. Selain itu juga dilaksanakan reviu dan verifikasi terhadap dokumen yang sudah disusun. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi penyusunan RPPLH pada beberapa Provinsi.

Adapun target pada tahun 2023 adalah 10 dokumen hasil kegiatan verifikasi dan review serta pembinaan teknis kepada daerah. Daerah yang telah melaksanakan kegiatan verifikasi sebanyak 5 daerah dengan rincian 4 provinsi dan 1 ibukota provinsi, daerah yang melakukan review sebanyak 4 daerah (1 ibukota provinsi 3 kabupaten) serta daerah yang diberikan pembinaan teknis sebanyak 1 daerah yaitu kota Dumai. Namun, target tahun 2023 terlampaui karena banyak daerah yang mengajukan asistensi teknis berupa review dokumen RPPLH Daerah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2. 4 Status Verifikasi Dokumen RPPLH Daerah Tahun 2023

NO.	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN 2023	OUTPUT
A.	**Provinsi**		
1.	Kepulauan Bangka Belitung	Reviu, monitoring dan evalusi penyusunan	Surat rekomendasi Perda
2.	Sulawesi Selatan	Reviu, monitoring dan evalusi penyusunan	Surat rekomendasi Perda
3.	Kalimantan Tengah	Reviu, monitoring dan evalusi penyusunan	Draft surat rekomendasi Perda
4.	Jawa Barat	Reviu, monitoring dan evalusi penyusunan	Penetapan Perda
5.	Bali	Reviu, monitoring dan evalusi penyusunan	Proses penetapan Perda
6.	Nusa Tenggara Barat	Verifikasi	Berita acara verifikasi
B.	**Kabupaten / Kota**		
1.	Kota Palu	Reviu, monitoring dan evalusi penyusunan	Surat rekomendasi Perda
2.	Kota Bandung	Verifikasi	Berita acara verifikasi
3.	Kota Banjarbaru	Asistensi	Draft dokumen
4.	Kota Bantul	Asistensi	Draft dokumen
5.	Kota Pangkalpinang	Asistensi	Draft dokumen
6.	Kota Dumai	Asistensi	Draft dokumen
7.	Kab. Limapuluh Kota	Reviu, monitoring dan evalusi penyusunan	Proses penetapan Perda
8.	Kab. Kebumen	Reviu, monitoring dan evalusi penyusunan	Proses penetapan Perda

Sumber: Direktorat PDLKWS

Gambar 2. 1 Dokumentasi Kegiatan Verifikasi RPPLH Daerah

Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Pemetaan Wilayah Ekoregion

1. Pemetaan Ekoregion

a. Pemetaan 6 Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000

Tahun anggaran 2023 Pokja Ekoregion melaksanakan kegiatan pemetaan ekoregion. Pemetaan ekoregion meliputi kegiatan verifikasi lapangan yang direncanakan pada wilayah ekoregion yang berada di Pulau/Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Ekoregion Darat Pada Peta Karakteristik Bentang Alam Dan Karakteristik Vegetasi Alami Skala 1:250.000 bulan Juli 2023.

Wilayah Ekoregion (WE) yang dilakukan verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan data yang valid dan dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan pada Tahun 2023 ada 2 (dua) WE, yaitu Nusa Sasak Rinjani dan Nusa Cendana Sasando. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 6 – 10 Maret dan 1 – 5 Agustus 2023.

Pelaksanaan terdiri dari tahapan *desk study* untuk dilakukan pencermatan terhadap data-data yang telah ada sehingga dapat ditentukan seberapa banyak titik lokasi yang perlu dilakukan pengecekan di lapangan. Titik lokasi berjumlah 15 pada WE Nusa Sasak Rinjani dan 18 pada WE Nusa Cendana Sasando. Tahapan yang kedua adalah tahapan cek lapangan (ground check). Data dan informasi yang diambil dari lapangan dicatat pada tallysheet yang berisi informasi terkait nomor titi, koordinat, nama administrasi, pengamatan dan pengukuran karakteristik bentang alam, pengamatan karakteristik vegetasi alami, dan dokumentasi kegiatan.

(a)

(b)

Gambar 2. 2 Dokumentasi Kegiatan Pemetaan Ekoregion (a): WE Nusa Cendana Sasando, (b): WE Nusa Sasak Rinjani

2. Pengembangan Data Informasi dalam rangka Penerapan Ekoregion

a. Penyusunan Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia

Kegiatan pembahasan penyusunan struktur dan isi buku deskripsi peta wilayah ekoregion Indonesia melibatkan pakar yang ahli di bidang sistem lahan dan ekologi untuk mendapatkan masukan yang berguna dalam membangun narasi buku yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penyusunan Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia dilakukan dengan skema pihak ketiga oleh PT. Siagaro Sumber Solusi sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) nomor SPK.21-A/PPK/D3TLH/PDLKWS/DIPA/2023 tanggal 9 Oktober 2023

Gambar 2. 3 Buku Deskripsi Peta Wilayah Ekoregion Indonesia

b. Draft SK Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000

Penyusunan Draft SK Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000 telah dilakukan dan dibahas beberapa kali dalam rapat. Direktorat PDLWKS telah bersurat kepada Biro Hukum untuk menindaklanjuti tahapan selanjutnya, yaitu Ekspose Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000. Namun, pada tahun 2023 tidak dilakukan ekspose melainkan

FGD Draft Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023 bersama dengan akedmisi yang ahli di bidang geomorfologi dari Universitas Gadjah Mada.

c. Pemetaan Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia Skala 1 : 250.000

Pelaksanaan kegiatan pemetaan karakteristik bentang alam laut dangkal Indonesia meliputi kegiatan pengolahan data dan cek lapangan. Tahapan pengolahan data dilakukan bersama dengan Tim Riset Goba dari Pusat Riset Penginderaan Jauh – BRIN, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – Universitas Diponegoro, dan staff fungsional Direktorat PDLKWS. Pengolahan yang dilakukan mengacu pada modul pengolahan yang dibuat berdasarkan penerapan model grafik dan citra komposit dengan divalidasi kesesuainnya dengan data lapangan melalui cek lapangan. Tahapan cek lapangan dilakukan pada 3 (tiga) lokasi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewakili karakteristik bentang laut Area Ungu (Busur Magmatik), Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewakili karakteristik bentang laut Area Hijau (Benua Renik), dan Provinsi Papua yang mewakili karakteristik bentang laut Area Biru (Busur Muka).

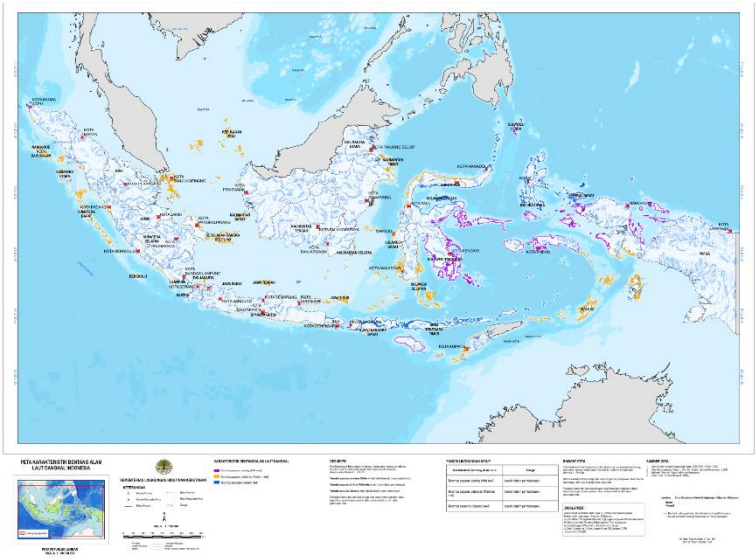

Gambar 2. 4 Peta Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal Indonesia Skala 1:250.000

Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kegiatan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terdiri dari serangkaian kegiatan untuk mencapainya, yaitu:

1. Penyusunan Juknis Penentuan Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan daerah

Petunjuk Teknis disusun untuk memperoleh persamaan persepsi dan metode dalam penentuan dan penetapan D3TLH Nasional. Dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini dibutuhkan pengarusutamaan dalam berbagai regulasi dan sektor dari tingkat nasional hingga provinsi. Untuk kebutuhan penetapan D3TLH di Provinsi dapat mengacu prosesnya dari D3TLH Nasional. Metode penyusunan Petunjuk Teknis menjelaskan tata cara dan alur yang dimulai dari proses dan prosedur, serta implementasi dari penetapan D3TLH Nasional hingga diturunkan dalam D3TLH Provinsi.

Penentuan dan penetapan D3TLH Nasional merupakan sebuah proses yang meliputi persiapan, analisis hingga penetapannya berdasarkan kondisi biogeofisik dan sosial, budaya, ekonomi yang akan tergambarkan melalui Kuadran Keberlanjutan. Pada bagian ini, akan dijelaskan lebih lanjut setiap proses dalam penentuan dan penetapan D3TLH Nasional yang terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu (1) Persiapan; (2) Penerapan Metode Biogeofisik; (3) Sintesis D3TLH; (4) Penerapan Metode Sosial, Ekonomi, dan Budaya; (5) Sintesis Kuadran Keberlanjutan; serta (6) Penetapan D3TLH.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun materi teknis terkait dengan penetapan D3TLH yang pada akhirnya memudahkan dalam melaksanakan penetapan D3TLH. Dokumen Petunjuk teknis dapat dilihat dari gambar berikut:

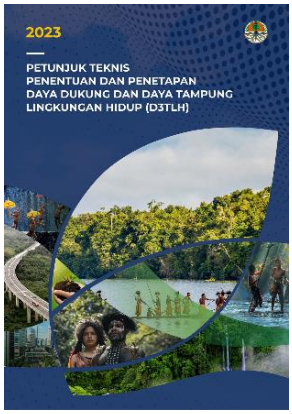

Gambar 2. 5 Dokumen Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH

2. Penyusunan Materi teknis D3TLH Nasional dan Daerah

a. Penyusunan Materi Teknis Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Salah satu alat penting dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan adalah penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Konsep ini membantu untuk menilai sejauh mana kapasitas lingkungan dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa menyebabkan degradasi fungsi ekosistem. Dengan menetapkan D3TLH, kita dapat mengidentifikasi batas-batas kapasitas alam sehingga kegiatan manusia dapat diatur dan dikendalikan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Metodologi penentuan D3TLH Nasional dilakukan melalui serangkaian penilaian secara kuantitatif dan kualitatif hasil diskusi dengan para pakar dan pemangku kepentingan terkait, dimulai dari pemodelan numerik hingga visualisasi secara spasial. Kerangka pikir dalam penentuan D3TLH mengadopsi konsep Social-Ecological System (SES) Framework. SES Framework merupakan penggambaran dinamika antara alam dengan sosial yang saling terkait dan bergantung pada suatu ekosistem. Dengan kata lain, terjadi hubungan timbal balik dimana kebutuhan manusia sangat bergantung pada pasokan ecosystem services (jasa lingkungan hidup) dan menjadi tantangan utama untuk mencapai keberlanjutan (Martín-López et al, 2014; Fischer et al, 2015).

Pada tahun 2023 telah dihasilkan 35 dokumen materi teknis Penetapan D3TLH nasional dan 34 provinsi. Empat provinsi DOB (daerah otonomi baru) di Pulau Papua belum disusunkan materi teknisnya. Pada tahun 2024 baru akan disusun untuk 4 provinsi DOB sekaligus merevisi materi teknis dua (2) provinsi Pulau Papua. Dokumen Materi Teknis dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2. 6 Dokumen Materi Teknis D3TLH Nasional dan 34 Provinsi

b. *Kick of Meeting* Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Provinsi

Tujuan "Kick *of Meeting* Penyusunan Materi Teknis Penentuan Dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah" adalah :

(1) Melakukan diseminasi Penyusunan Materi Teknis Penentuan Dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah kepada pemerintah daerah di 34 provinsi.
(2) Memberikan pemahaman pentingnya penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagai baseline data dan informasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.
(3) Memberikan pemahaman tata cara penetapan D3TLH.

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah memahami konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pada akhirnya dapat menetapkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 12 ayat (3).

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelibatan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah di 34 provinsi dan praktisi maupun akademisi yang terlibat dalam penyusunan kajian terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, narasumber yang terlibat dari Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 2. 7 *Kick of Meeting* Penyusunan Materi Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH Nasional dan Daerah

c. *Workshop* Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi

Workshop penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan sebagai rangkaian dari kegiatan penyusunan materi teknis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup. Kegiatan *workshop* penetapan

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi sebagai sarana diskusi antara pemangku kepentingan dalam Menyusun surat Keputusan terkait penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan SK penetapan D3TLH berdaya guna dan berhasil guna dalam perencanaan Pembangunan. Workshop melibatkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Biro Hukum dari 34 provinsi.

Gambar 2. 8 *Workshop* penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

d. *Focus Group Discussion* Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi

Kegiatan focus group discussion penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan tindak lanjut dari dua kegiatan sebelumnya yaitu kick off meeting penetapan D3TLH Provinsi dan Workshop penetapan D3TLH Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk Menyusun draft surat Keputusan gubernur tentan penetapan D3TLH provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di 32 (tiga puluh dua) provinsi dengan tanggal pelaksanaan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 5 Pelaksanaan FGD Penetapan D3TLH Provinsi

NO	PROVINSI	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Banten	29 November 2023
2	Nusa Tenggara Barat	1 Desember 2023
3	Lampung	4 Desember 2023
4	Sulawesi Utara	
5	Kalimantan Utara	
6	Kalimantan Barat	
7	Papua	5 Desember
8	Jawa Timur	
9	Jawa Tengah	
10	DKI Jakarta	
11	Sulawesi Tengah	
12	Gorontalo	6 Desember 2023
13	Kalimantan Tengah	
14	Sulawesi Selatan	
15	Kalimantan Selatan	
16	Sumatera Barat	7 Desember 2023
17	Sumatera Selatan	
18	Bali	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Riau	
21	Kepulauan Bangka Belitung	

NO	PROVINSI	TANGGAL PELAKSANAAN
22	Maluku Utara	
23	Sulawesi Tenggara	
24	Bengkulu	
25	Papua barat	8 Desember 2023
26	Kalimantan Timur	
27	Jambi	
28	DIY	
29	Maluku	13 desember 2023
30	Sulawesi Barat	11 desember 2023
31	Kepulauan Riau	11 desember 2023
32	Jawa Barat	9 November 2023
33	Sumatera Utara	
34	Aceh	1 Desember 2023

Sumber: Direktorat PDLKWS

e. Diseminasi Pendayagunaan Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang, Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan diseminasi dilaksanakan dengan melibatkan unsur KLHK, pemerintah, akademisi dan praktisi lingkungan. Tujuan Diseminasi Pendayagunaan Data Dan Informasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Usaha Dan/Atau Kegiatan adalah:

(1) Melakukan diseminasi hasil penyusunan materi teknis D3TLH Nasional dan materi teknis D3TLH di 34 provinsi.
(2) Memberikan pemahaman pentingnya penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagai baseline data dan informasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam.
(3) Memberikan gambaran pemanfaatan jasa lingkungan hidup dalam berbagai kebijakan pembangunan dan sektor

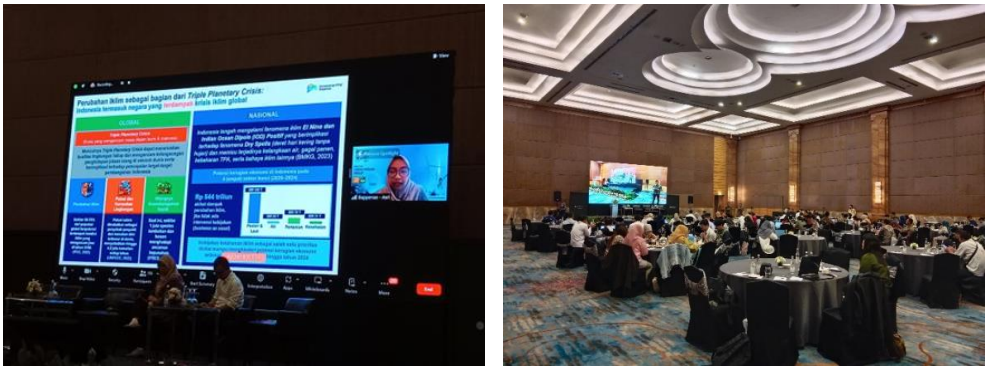

Gambar 2. 9 Diseminasi hasil penyusunan materi teknis D3TLH Nasional dan materi teknis D3TLH di 34 Provinsi

3. Fasilitasi Penetapan D3TLH Daerah

Fasilitasi dan asistensi penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah bertujuan untuk mendampingi daerah dalam proses penetapan D3TLH provinsi, kabupaten atau kota. Provinsi/kabupaten/kota yang sudah mendapatkan fasilitasi dari Direktorat PDLKWS disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6 Fasilitasi Penetapan D3TLH Daerah

PULAU/KEPULAUAN	PROVINSI	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN/ KOTA
Jawa	Banten	Kota Tangerang Selatan
	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul
	Jawa Barat	Bekasi
		Ciamis
		Garut
		Kota Bekasi
		Kota Bogor
		Kota Depok
	Jawa Tengah	Banyumas
		Blora
		Boyolali
		Kota Magelang
		Pekalongan
		Wonogiri
	Jawa Timur	Malang
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu
		Sekadau
	Kalimantan Selatan	Tapin
	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur
		Seruyan
	Kalimantan Timur	Berau
		Kutai Barat
		Mahakam Ulu
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat
		Belitung Timur
	Kepulauan Riau	Bintan
	Sumatera Selatan	Lahat
		Ogan Komering Ilir
Balinusra	Nusa Tenggara Barat	Bima
	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima
	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur
Papua	Papua	Jayapura
		Merauke
	Papua Barat	Fak Fak
		Raja Ampat
		Teluk Bintuni
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan

Sumber: Direktorat PDLKWS

4. Monitoring dan Evaluasi Penetapan D3TLH Daerah

Untuk memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi penetapan D3TLH daerah lebih berjalan efektif dan efisien, maka disusun petunjuk teknis atau pedoman Monitoring dan evaluasi penentuan dan penetapan D3TLH. Tujuan dari kegiatan penyusunan petunjuk teknis Monitoring dan evaluasi penentuan dan penetapan D3TLH bertujuan untuk:

a. Memastikan proses penentuan D3TLH sesuai dengan Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan D3TLH;
b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala, agar segera dapat diupayakan penyelesaian permasalahan;

c. Melakukan penilaian efektivitas dan efisiensi kegiatan penentuan dan penetapan D3TLH Daerah;
d. Menghasilkan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses pencapaian target dan indikator kegiatan sebagai bahan perbaikan.

Keluaran (output) dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah dihasilkannya laporan yang memuat:

a. progress penyelenggaraan kegiatan penentuan dan penetapan D3TLH,
b. kesesuaian antara rencana dengan hasil kegiatan,
c. kendala-kendala yang ada serta
d. saran/rekomendasi baik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun
e. saran rekomendasi yang dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan di masa datang.

Proses dalam penentuan dan penetapan D3TLH terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu (1) Persiapan; (2) Penerapan Metode Biogeofisik; (3) Sintesis D3TLH; (4) Penerapan Metode Sosial, Ekonomi, dan Budaya; (5) Sintesis Kuadran Keberlanjutan; serta (6) Penetapan D3TLH. Monitoring dan Evaluasi D3TLH merupakan alat untuk memastikan bahwa penentuan dan penetapan D3TLH berada pada alur dan metode yang sudah disepakati. Dokumen petunjuk teknis monev D3TLH disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2. 10 Dokumen Petunjuk Teknis Monev D3TLH

Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi (65 juta Ha)

Tahun 2023, Kelompok Kerja Jasa Lingkungan Hidup (POKJA Jasling) mendapatkan mandat untuk mengerjakan Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi yang dikemas dalam kegiatan Identifikasi Informasi Geopasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi yang besarannya secara keseluruhan sebanyak Rp. 3.360.523.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Kegiatan ini terbagi menjadi 5 (lima) sub kegiatan dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) sebanyak Rp. 1.051.523.000, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP atau biasa disebut sebagai PNP) sebanyak Rp. 2.309.000.000, yaitu:

1. Rupiah Murni (RM)
   - Penyusunan Petunjuk Teknis Terkait Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, sebanyak Rp. 179.552.000
   - Sosialisasi Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan dan Monev Pelaksanaan Verifikasi Lapangan, sebanyak Rp. 512.621.000
   - Penyusunan Laporan (Sintesis) Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, sebanyak Rp. 359.350.000.

Output dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan sumber dana RM ini berupa "Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air" yang telah terbit dan disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. 22/SET.2/KUM.1/7/2023 tanggal 25 Juli 2023. Output tambahan dari kegiatan ini yaitu (1) Panduan Pengisian Daftar Isian Wawancara dan Kuesioner Untuk Pelaksanaan Verifikasi Lapangan JLH Tinggi Air; dan (2) Laporan (Sintesis) Hasil Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP / PNP)
   - Penyusunan Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, sebanyak Rp. 2.182.783.000
   - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Informasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, sebanyak Rp. 126.217.000

Sub kegiatan ini dikerjasamakan dengan Yayasan Lokus Bijak Hijau Lestari (Yayasan Lokahita) melalui mekanisme swakelola Tipe 3. Output dari 2 (dua) sub kegiatan ini berupa "Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, dan Karbon", yang dikemas dalam bentuk dokumen (dokumen lengkap beserta peta-peta pendukungnya dan dokumen/album peta). Untuk menghasilkan *output* inti tersebut dilakukan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait Air, Kehati, Karbon sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan penyusunan IG ini.

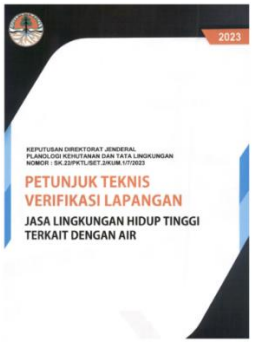

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Gambar 2. 11 Dokumentasi Kegiatan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi: (a) Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan; (b) Kegiatan Sosialisasi Verifikasi Lapangan (Outdoor) di BPKHTL Yogyakarta; (c) Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Verifikasi Lapangan BPKHTL Denpasar di Provinsi Bali; (d) Penyusunan Laporan Sintesis Hasil Verifikasi Lapangan; (e) Diseminasi Sintesis Hasil Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air dan Pendayagunaan Infiormasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air, Kehati, dan Karbon; (f) Laporan Penyusunan IG Jasa Lingkungan Hidup Tinggi

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang Divalidasi

Pada tahun 2023 berdasarkan target capaian kinerja, terealisasi 65 Dokumen KLHS tyang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Adapun rincian dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7 Dokumen KLHS Tervalidasi Tahun 2023

NO	KLHS RTRW PROVINSI (20)	KLHS RTR KSN (19)	KLHS RDTR (17)	KLHS RPJPD PROVINSI (6)	KLHS KRP LAINNYA (3)
1.	Maluku	IKN	WP IKN	Sulawesi Tenggara	SWD Taman Nasional Komodo
2.	Gorontalo	Maminasata	KPN Sei Pancang	Gorontalo	SWD THRS
3.	Sulawesi Tenggara	Meibidangro	KPN Attambua	Maluku	FE Merauke
4.	Jawa Tengah	Laut Lepas	KPN Merauke	Sumatera Selatan	
5.	Jawa Timur	Banjarbakula	KPN NTT	Sulawesi Tengah	
6.	Banten	Bimindo	KPN Yettetkum	Bengkulu	
7.	Kalimantan Selatan	TNKS	KPN Ranai		
8.	Kalimantan Tengah	Rinjani	KPN Gerbang Serasan		
9.	Kepulauan Riau	Maninjau	IKN WP KIPP		
10.	Bengkulu	Laut Banda	IKN WP Barat		
11.	Lampung	Perbatasan Kalimantan	IKN WP Selatan		
12.	Sumatera Selatan	Toraja	IKN WP Timur 1		
13.	Bali	Pancang Sanak	IKN WP Timur 2		
14.	NTB	Ujung Kulon	IKN WP Utara		
15.	NTT	Muara Jambi	IKN WP Simpang Semboja		
16.	DKI Jakarta	Limboto	IKN WP Kuala Semboja		
17.	D. I. Yogyakarta	Trowulan	IKN WP Muara Jawa		
18.	Maluku Utara	RTR Pulau Kalimantan			
19.	Papua	RTR Pulau Sumatera			
20.	Kalimantan Barat				

Sumber: Direktorat PDLKWS

Dalam rangka menghasilkan output Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya sebanyak 65 dokumen KLHS tersebut, maka dilaksanakan serangkaian kegiatan pendukung yang meliputi:

1. Asistensi Teknis dan Validasi KLHS Tata Ruang

Pada tahun 2023, beberapa dokumen KLHS Tata Ruang diajukan untuk divalidasi dan beberapa asistensi teknis dilakukan meliputi:

a. Regional Sumatera

- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044 pada Bulan November 2023
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 pada Bulan November 2023
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Aceh Tahun 2023-2043 pada Bulan Desember 2023
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2023-2043 pada Bulan Desember 2023
- Persetujuan validasi KLHS RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Serasan melalui surat nomor S.1306/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023
- Persetujuan validasi KLHS RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Pusat Kegiatan Strategis Nasional Ranai melalui surat nomor S.1307/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023

b. Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

- Asistensi Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan secara daring pada Bulan Januari 2023
- Asistensi Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Rinjani dan sekitarnya secara daring pada Bulan Februati 2023
- Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi NTT di Hotel Mercure Sabang, Jakarta pada Bulan Agustus 2023
- Asistensi Teknis Penyusunan KLHS RTRW Provinsi NTT secara daring pada Bulan Agustus 2023
- Asistensi Teknis Penyusunan KLHS RTRW Provinsi NTT secara daring pada Bulan September 2023
- Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi NTT di Kantor DLHK Provinsi NTT pada Bulan November 2023
- Persetujuan Validasi KLHS RTR Pulau Jawa-Bali melalui surat nomor: S.124/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2023 tanggal 20 Januari2023
- Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi NTB melalui surat nomor: S.185/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023 tanggal 3 Februari 2023
- Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor: S.212/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023 tanggal 9 Februari 2023
- Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi DI Yogyakarta melalui surat nomor: S.268/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023 tanggal 17 Februari 2023
- Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah melalui surat nomor: S.1309/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023

c. Regional Kalimantan

- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Direktorat PDLKWS pada Bulan Maret 2023
- Persetujuan validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat nomor S.366/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2023 tanggal 24 Maret 2023
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RDTR IKN WP Barat, Selatan, Utara, Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa secara luring pada Bulan Februari 2023
- Persetujuan validasi KLHS RDTR IKN WP Barat, Selatan, Utara, Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTR Pulau Kalimantan secara luring pada Bulan Agustus 2023
- Persetujuan validasi KLHS RTR Pulau Kalimantan melalui surat nomor S.1310/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Rapat Direktorat PDLKWS pada Bulan November 2023

d. Regional Sulawesi, Maluku dan Papua

- Persetujuan Validasi KLHS RTRW Provinsi Gorontalo dan KLHS RTR KSN Perkotaan Mamminasata
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Maluku Utara pada bulan November 2023 di Ruang Rapat BPKHTL Wilayah IX Ambon
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Desember 2023 di Hotel Morrissey, Jakarta

Gambar 2. 12 Pelaksanaan Asistensi Teknis dan Validasi KLHS Tata Ruang

2. Asistensi Teknis dan Validasi KLHS RPJPD/RPJMD dan KRP Lainnya

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak tahun 2024, maka Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan bagi kepala daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dilakukan validasi dan asistensi teknis KLHS RPJPD dan RPJMD yang meliputi:

a. Regional Sumatera

- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 pada Bulan Desember 2023
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Bulan Desember 2023
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada Bulan Desember 2023
- Pelaksanaan Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 pada Bulan Desember 2023

b. Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

- Asistensi Teknis KLHS RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Bappeda DI Yogyakarta pada Bulan Mei 2023
- Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Banten di Soll Marina Hotel Serpong pada Bulan November 2023
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah di Hotel Alana, Sentul Bogor pada Bulan November 2023
- Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta secara daring pada Bulan November 2023
- Asistensi Teknis KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta di Hotel Mercure Sabang, Jakarta pada Bulan November 2023
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi NTB Jakarta di Hotel Mercure Sabang, Jakarta pada Bulan November 2023
- Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi NTB di Kantor DLHK NTB pada bulan November 2023
- Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah di Hotel Morrissey Jakarta pada Bulan Desember 2023
- Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Morrissey Jakarta pada Bulan Desember 2023
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta secara daring pada Bulan November 2023
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Bali di Kantor BPKHTL Wil. Denpasar pada Bulan Desember 2023

c. Regional Kalimantan

- Asistensi teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Morissey Jakarta pada Bulan Desember 2023
- Asistensi teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara di kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Kalimantan Utara pada Bulan Desember 2023
- Asistensi teknis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Timur secara daring pada Bulan Desember 2023

d. Regional Sulawesi, Maluku dan Papua

- Validasi KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo, KLHS RPJPD Provinsi Maluku dan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Maluku di Kantor BPKHTL Ambon pada bulan November 2023 Pengembangan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria), Kelembagaan dan SDM Kajian LIngkungan Hidup Strategis
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah di kantor BPKHTL Palu pada bulan Desember 2023
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2023
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Desember 2023 di Hotel Pullman Jakarta Central Park
- Asistensi Teknis KLHS RPJPD Provinsi Papua Selatan pada bulan Desember 2023

Gambar 2. 13 Pelaksanaan Asistensi Teknis KLHS Rencana Pembangunan

Penyusunan Draft Peraturan Menteri Pengganti PermenLHK 69 Tahun 2017

Penyusunan Draft Peraturan Menteri Pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dilaksanakan karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti. Berkaitan hal tersebut di atas perlu dilakukan: 1) penyederhanaan regulasi; 2) penguatan standar kompetensi SDM KLHS; 3) penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi KLHS; dan 4) penataan proses bisnis penyelenggaraan KLHS.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut disusun Draft PermenLHK pengganti PermenLHK 69/2017 yang menambahkan pengaturan mengenai standar kompetensi penyusun dan validator KLHS, mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS; dan mekanisme proses validasi KLHS yang lebih jelas. Penyusunan PermenLHK pengganti PermenLHK 69/2017 dilaksanakan pada bulan April 2023, dimulai dengan rapat koordinasi antara unit kerja terkait yaitu Direktorat PDLKWS, Pusrenbang LHH, Pusdiklat SDM LHK, Bagian Hukum Setditjen. PKTL, Bagian Hukum Setditjen. BP2SDM dan Biro Hukum KLHK. Selanjutnya setelah Tim Penyusun dibentuk, dilaksanakan penyusunan draft pengganti PermenLHK 69/2017 melalui serangkaian rapat-rapat pembahasan. Adapun tahapan penyusunan draft tersebut dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

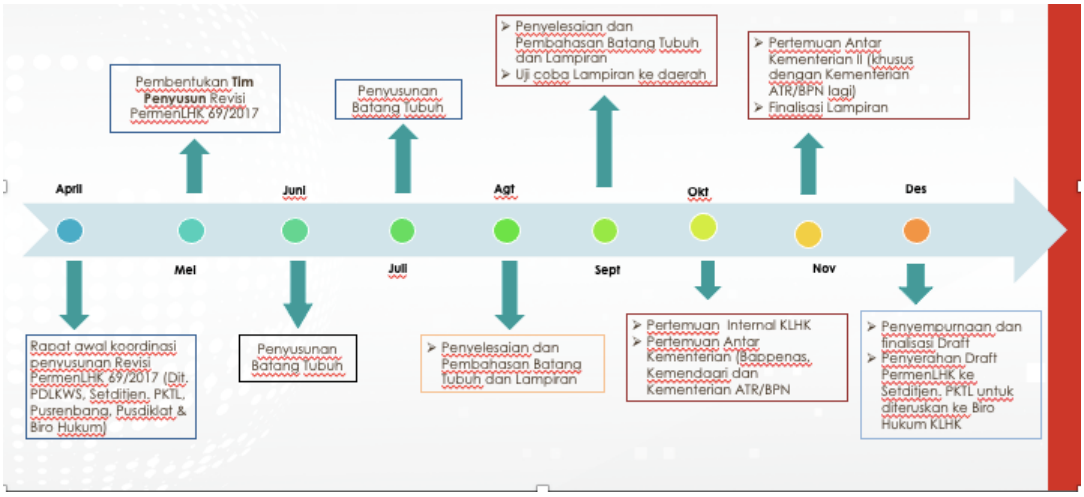

Gambar 2. 14 Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Draft Peraturan Menteri

Pengembangan Sistem Informasi KLHS Terintegrasi (Layanan Ekoregion)

Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan sistem informasi untuk modul data dan informasi Ekoregion. Pengembangan yang dilakukan dikhususkan untuk visualisasi data dan analisa berbasiskan WebGIS. Workflow pembuatan aplikasi ini terbagi dalam 5 fase pengerjaan yang dideskripsikan sebagai berikut:

1) Fase Pertama adalah *Assessment Phase* yang terbagi dalam 3 (tiga) sub bagian pengerjaan yaitu User interview, Pengumpulan data dan konfirmasi hasil pengumpulan data. Selama fase ini sudah dilakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali.
2) Fase Kedua adalah *Development Phase*, yang dimana ini adalah fase dimana pembuatan Infrastruktur dan terbagi ke 4 (empat) sub bagian pengerjaan, yaitu pembuatan *redis development*, pembuatan server aplikasi *development*, pembuatan *Postgresql Development* dan terakhir pembuatan *design* awal UI/UX.
3) Fase Ketiga adalah User Management, dimana fase ini terbagi dalam 3 (tiga) sub bagian pengerjaan, yaitu melakukan pembuatan User Registration, pembuatan Login dan pembuatan *Forgot & Change Password*.
4) Fase Keempat adalah *EkoLocation Maps*, di mana fase ini terbagi dalam 4 (empat) sub bagian pengerjaan, yaitu melakukan pembuatan *Showing Properties Data on The Maps*, melakukan pembuatan *Filter by Area*, melakukan pembuatan Analisa *Data on Maps*, dan yang terakhir melakukan pembuatan *Filter by Polygon / GeoJSON File*.
5) Fase Kelima adalah *Master Data*, dimana fase ini terbagi dalam 2 (dua) sub bagian pengerjaan yaitu melakukan *Sync ArcGIS to Ekoregion Dataset* dan *Export GeoJSON to SHP*.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KLHS

Semenjak ketentuan penyelenggaraannya pada tahun 2009, KLHS bertransformasi menjadi dokumen wajib bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan semangat mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pembangunan suatu wilayah, maka KLHS hadir sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan KLHS tidak hanya terbatas pada dokumen kajian namun juga memberi pengaruh terhadap dokumen KRP dan bagaimana hasil rekomendasi KLHS diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan amanat PP 46/2016 Pasal 36, yaitu pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat pembuatan KLHS; dan terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi. Namun demikian, mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam PermenLHK 69/2017 sebagai penjabaran teknis dari PP 46/2016 belumlah cukup bagi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Sehingga, banyaknya dokumen KLHS yang dihasilkan tidak dilakukan upaya menjamin rekomendasi KLHS dilaksanakan setelah proses validasi. Oleh karenanya, perlu disusun pedoman Monev KLHS disusun dalam rangka memberikan panduan bagi:

a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat nasional;
b. menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian melalui pejabat eselon I yang ditunjuk, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS di sektornya masing-masing sesuai dengan kewenangannya;

c. Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi lingkungan hidup, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat Daerah provinsi; dan
d. bupati/wali kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2023, disusunlah draft Pedoman monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan KLHS sebagai bahan masukan lampiran Peraturan Menteri pengganti Peraturan Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017. Selain penyusunan draft pedoman, juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KLHS ke daerah, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.

Bimbingan Teknis KLHS

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan: a) pembuatan dan pelaksanaan KLHS; b) penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan validasi KLHS.

Guna memastikan bahwa penyusunan KLHS tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka dilaksanakannya Bimbingan Teknis KLHS yang meliputi penyusunan KLHS Tata Ruang, KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS KRP Lainnya. Selain tata cara penyelenggaraan KLHS, pada bimbingan teknis ini juga dilaksanakan desiminasi terkait dengan standar kompetensi kerja khusus (SKKK) KLHS dan Kurikulum Pelatihan Penyelenggaraan KLHS yang telah disusun pada tahun 2022. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan di 4 (empat) wilayah regional yang meliputi:

1. Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Denpasar, 13 – 15 Juni 2023)
2. Regional Sulawesi, Maluku dan Papua (Makassar, 19 – 21 Juni 2023)
3. Regional Kalimantan (Banjarbaru, 11 – 14 Juli 2023)
4. Regional Sumatera (Batam, 25 – 27 Juli 2023)

Gambar 2. 15 Pelaksanaan Bimbingan Teknis KLHS

Selain itu, bimbingan teknis secara spesifik juga dilakukan dalam rangka membantu daerah tertentu dalam menyusun KLHS RTRW, RPJPD ataupun RPJMD. Bimbingan teknis secara spesifik dilakukan untuk penguatan kapasitas daerah dan mempercepat penyusunan dokumen KLHS. Pada tahun 2023, pelaksanaan bimbingan teknis KLHS secara spesifik dilaksanakan di:

1. Regional Sumatera
   - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS RTRW/RDTR di BPKHTL XIII Pangkalpinang pada tanggal 8 s/d 9 November 2023;
   - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan KLHS RTRW/RDTR di BKSDA Aceh pada tanggal 27 s/d 28 November 2023; dan
   - Pelaksanaan Bimbingan Teknis KLHS RPJPD Provinsi Lampung di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2023.

2. Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Pelaksanaan Bimbingan Teknis KLHS RPJPD Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara di Hotel Alana Sentul pada tanggal 13 s/d 14 November 2023, yang dihadiri oleh DLH/DLHK Provinsi, Bappeda Provinsi, dan BPKHTL lingkup Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara baik secara luring maupun daring.

3. Regional Kalimantan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan KLHS RPJPD dan KLHS RTRW di Kantor DLHK Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 7 s/d 10 November 2023, yang dihadiri oleh DLHK Provinsi dan DLH Kab/Kota se-Kalimantan Barat

4. Regional Sulawesi, Maluku dan Papua
   - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus KLHS Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua yang diadakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Kota Ambon pada tanggal 2 November 2023
   - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus KLHS RPJPD untuk Daerah Otonomi Baru di Papua, yang dilaksanakan di Kota Manokwari pada tanggal 14 – 17 November 2023

Pengembangan NSPK KLHS – Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS

Pada tahun 2023 dilakukan Penyusunan Modul Diklat Penyelenggaraan KLHS mengacu pada kurikulum yang sudah disusun sebelumnya pada tahun 2022. Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS dilakukan melalui serangkaian rapat pembahasan, penulisan dan proses *Focus Group Discussion* (FGD). Proses FGD difokuskan pada pemantauan perkembangan penulisan modul dan bahan ajar termasuk di dalamnya mengundang para narasumber dari akademisi dan praktisi ahli untuk memberikan penguatan terhadap modul yang disusun. Narasumber ini berasal dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan harapan dapat memberikan masukan strategis untuk meningkatkan kualitas modul dan bahan ajar yang disusun. Tahapan penyusunan modul pelatihan penyelenggaraan KLHS dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 16 Tahapan Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS

Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan melalui swakelola tipe 3. Kerjasama KLHK dengan Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan (PEPSILI) sebagai pelaksana kegiatan. Dari hasil Kerjasama ini dihasilkan 18 (delapan belas) modul pelatihan penyelenggaraan KLHS yang meliputi:

a. Modul Pelatihan Pengantar KLHS (5 Modul), yang terdiri dari:
   - Kebijakan KLHS
   - Konsep Dasar KLHS
   - Kebijakan, Rencana dan Program
   - Penyelenggaraan KLHS
   - Pendekatan Dalam KLHS

b. Modul Pelatihan Penyusunan KLHS (10 Modul), yang terdiri dari:
   - Melakukan Penapisan KRP yang Wajib KLHS
   - Menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS
   - Melibatkan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
   - Melakukan Kajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
   - Merumuskan Alternatif Penyempurnaan KRP
   - Menyusun Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP
   - Melakukan Penilaian Mandiri terhadap KLHS
   - Melakukan Pendokumentasian KLHS
   - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KLHS
   - Kode Etik Kajian Lingkungan Hidup

c. Modul Pelatihan Validasi KLHS (3 Modul), yang terdiri dari:
   - Merencanakan Validasi KLHS
   - Melaksanakan Validasi KLHS
   - Sistem Informasi KLHS

d. Naskah Studi Kasus

Gambar 2. 17 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan KLHS

Monitoring dan Evaluasi KLHS IKN

Dalam rangka menjamin penyempurnaan alternatif dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) Ibu Kota Nusantara oleh Kementerian LHK dalam hal ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Kegiatan pemantauan ini selaras dan sebagai bentuk dukungan untuk Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang memiliki posisi sebagai Sekretaris dalam Satuan Tugas Pembangunan IKN lingkup KLHK yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KLHK.

Selain kegiatan rapat koordinasi serta kunjungan lapangan pada periode awal hingga pertengahan tahun 2023 sebagai dukungan untuk Satgas Pembangunan IKN lingkup KLHK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KLHS Ibu Kota Negara juga melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun kajian beserta desk study dari hasil koordinasi dan pembahasan dengan K/L terkait, Otorita IKN, unit kerja eselon 1 KLHK dengan dikaitkan pada 5 focal area (air, udara, keanekaragaman hayati, lahan, dan laut) serta sosial yang menjadi konsentrasi dari arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perpres 63 Tahun 2022 terkait Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
2. Verifikasi lapangan pada 5 focal area dengan mengambil 8 lokasi sampel (air, udara, keanekaragaman hayati, lahan, dan laut) serta sosial yang menjadi konsentrasi dari arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perpres 63 Tahun 2022 terkait Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Gambar 2. 18 Kondisi Perubahan di Lapangan terkait Pembangunan IKN

Penyelenggaraan KLHS TRHS dan TN Komodo

1. KLHS *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* (TRHS)

Penyelenggaraan KLHS Tropical Rain Forest Heritage of Sumatera (TRHS) berdasarkan pada Surat Keputusan No. SK.375/MENLHK/SETJEN/KUM.I/4/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Warisan Alam Dunia TRHS dan Taman Nasional Komodo. Berikut rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan KLHS TRHS, yaitu:

1) *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelenggaraan KLHS di TNGL, TNKS, TNBBS, dan TNK pada tanggal 21 Maret 2023 di The Sultan Hotel & Residance Jakarta, pertemuan tersebut membahas mengenai (1) mekanisme penyusunan KLHS berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dengan mekanisme yang dikeluarkan oleh UNESCO/IUCN; (2) perencanaan detail mekanisme pertemuan, konsinyering, dan pertemuan lainnya yang akan diselenggarakan kemudian; dan (3) pembagian tugas. Diskusi tersebut turut mengundang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UNESCO, dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2) Pembahasan Laporan KLHS TRHS dan TNK pada tanggal 28 April 2023 melalui *zoom meeting*. Berdasarkan pertemuan tersebut membahas mengenai metode penentuan wilayah analisis dan metode analisis menggunakan *Geographic Information System* (GIS). Hasil dari pertemuan ini ditindaklanjuti melalui pertemuan di tanggal 17 – 18 April 2023 membahas mengenai batas wilayah perencanaan dan penentuan KRP yang telah terintegrasi dengan RZWP3K;
3) Kunjungan lapang dan Konsultasi Publik ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada tanggal 9-14 Mei 2023, Kunjungan Lapang dalam rangka Pengambilan Data dan Informasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada tanggal 9-13 Mei 2023, Kunjungan Lapang dalam rangka Pengambilan Data dan Informasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) pada tanggal 16-21 Mei 2023. Kunjungan lapang tersebut bertujuan untuk pengumpulan data primer dan sekunder serta mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan;
4) Pertemuan dan konsinyering dalam rangka penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan laporan KLHS TRHS yang dilaksanakan dalam rentang bulan Juli – Oktober 2023;
5) Finalisasi laporan KLHS TRHS dilakukan di bulan November. Dokumen lengkap KLHS TRHS didistribuskan ke Ditjen KSDA dan Taman Nasional terkait. Selanjutnya proses translating laporan ke dalam versi bahasa inggris sebelum submit ke UNESCO.

Gambar 2. 19 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan KLHS TRHS

2. KLHS Taman Nasional Komodo

Penyelenggaraan KLHS Taman Nasional Komodo diawali dengan kick off meeting secara daring pada Bulan Februari 2023 yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal PKTL dan Direktorat Jenderal KSDAE. Selanjutnya dilaksanakan rapat internal subdirektorat KLHS untuk membahas tindak lanjut penyusunan dokumen KLHS TN Komodo. Pada Bulan Mei 2023, dilaksanakan kegiatan konsultasi publik dan kunjungan lapangan ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Konsultasi Publik diselenggarakan di Kantor Komodo Visitor Center Labuan Bajo yang dihadiri oleh pemerintah daerah provinsi NTT, BPKHTL Kupang, BTN Komodo, penggiat lingkungan, praktisi, dan akademisi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring isu pembangunan berkelanjutan sekaligus penyampaian hasil sementara KLHS TN Komodo. Sementara itu, kegiatan kunjungan lapangan bertujuan untuk verifikasi data sekunder terutama terkait OUV dan kondisi habitatnya. Pada Bulan Juli-Oktober 2023, diselenggarakan FGD dan konsinyering internal dalam rangka pengolahan data dan penyusunan dokumen KLHS TN Komodo yang terdiri dari laporan penapisan dan laporan pelingkupan. Dalam proses penyusunannya, tim dibantu oleh beberapa pakar seperti akademisi dari Komodo Survival Program, Institut Pertanian Bogor, serta Institut Teknologi Bandung. Pada Bulan November 2023 laporan KLHS TN Komodo telah selesai disusun, selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk diterjemahkan ke dalam bahasa inggris. Tahap terakhir adalah pelaporan hasil kajian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal KSDAE.

Penguatan Instrumen Tata Lingkungan

Pada tahun anggaran 2023, Dit. PDLKWS masih berperan dalam menjembatani transformasi BPKHTL dengan peran barunya di bidang tata lingkungan. Berikut ini adalah kegiatan terkait pemenuhan Layanan Kajian Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan:

1. Penyusunan Pedoman Operasional Kajian Lingkungan Hidup
2. Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Instrumen Tata Lingkungan BPKHTL, Yogyakarta, 6-7 Juli 2023
3. Rapat Koordinasi Tata Lingkungan: Penguatan Peran Instansi LH Daerah dan BPKHTL sebagai Penerapan Instrumen Tata Lingkungan untuk Mewujudkan Keberlanjutan di Tingkat Daerah dan Tapak, Jakarta, 24-25 Agustus 2023
4. Pendampingan BPKHTL dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup DPCLS 8 Provinsi, Agustus-September 2023
5. Penguatan Kompetensi Penyusunan Kajian LH dengan Mendayagunakan Instrumen Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan, Makassar, 18-20 Oktober 2023
6. Draft SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Petunjuk Teknis Operasionalisasi Instrumen Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan TA 2023-2024 dan Kerangka Kegiatan 2025-2030

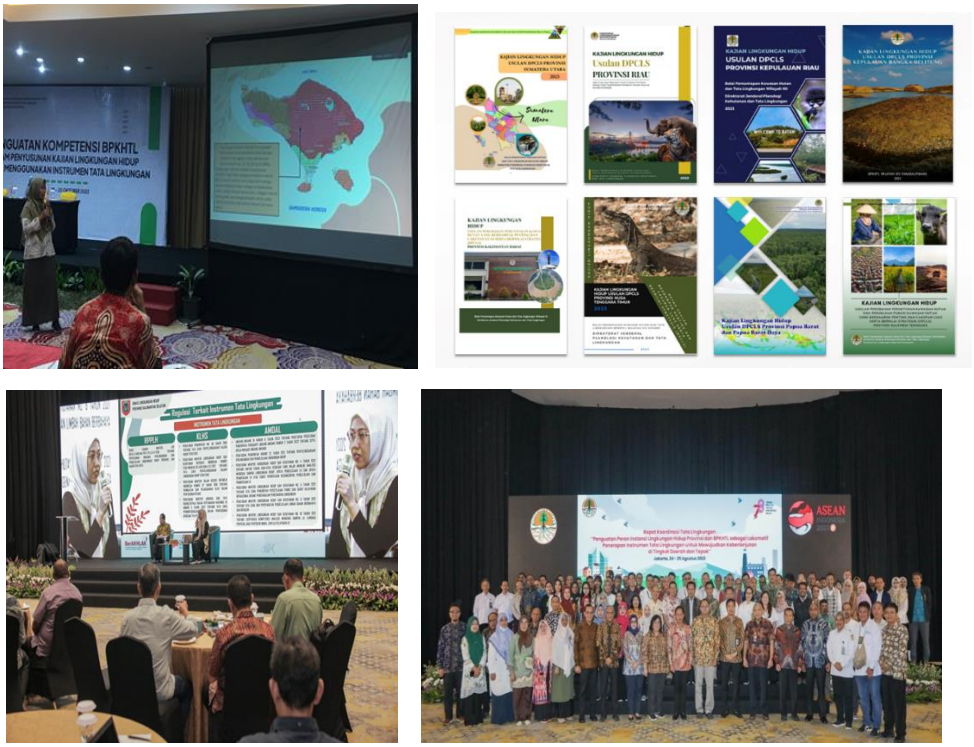

Gambar 2. 20 Dokumentasi Kegiatan Penguatan Tata Lingkungan

Kajian Pengamanan LH Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi dan Kalimantan Selatan

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya berasal faktor manusia (antroposentris), diantaranya pembukaan lahan baru untuk kegiatan pertanian yang menggunakan metode pembakaran untuk proses land clearing, praktek pertanian yang tidak berkelanjutan. Faktor cuaca ekstrim juga merupakan salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan. Adanya fenomena El Nino pernah menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif di Indonesia pada tahun 1997 yang berdampak sangat luas pada kerugian ekonomi dan kesehatan dan tentunya juga kerugian ekologis. Kebakaran yang cukup besar juga terjadi di 2015, dan terulang kembali di 2019.

Berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, sebagai respon dalam menanggapi bencana Karhutla maka diperlukan penyusunan kajian pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagai awalan, penyusunan kajian dilakukan di Provinsi Jambi dan di Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan karhutla tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dan dikembangkan dari berbagai konteks dan komprehensif yang nantinya dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan regulasi.

Proses penyusunan kajian pengendalian karhutla melibatkan berbagai unsur yaitu Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Unit Pelaksana Teknisnya, Akademisi, Dunia Usaha, instansi sektoral terkait lainnya baik pusat dan daerah serta masyarakat serta Masyarakat/Pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Focus Group Discussion (FGD)
- Kunjungan lapangan
- Penulisan laporan

Kegiatan ini dilaksanakan pada periode akhir November hingga Desember 2023, sehingga telah menghasilkan rekomendasi teknis dan operasional yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait dalam menyusun dan melaksanakan rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan. Rekomendasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya

pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta terutama memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan serta menjaga keberlanjutan lingkungan Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Layanan Umum Direktorat PDLKWS

Layanan dukungan manajemen Direktorat PDLKWS dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat PDLKWS. Kegiatan dukungan manajemen Direktorat PDLKWS terdiri dari penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan kepegawaian, pengadaan peralatan dan perkantoran, penataan arsip, serta pelayanan umum/pelayanan rumah tanggal yang dilakukan sepanjang tahun.

Anggaran yang dialokasikan untuk layanan dukungan manajemen lingkup Direktorat PDLKWS pada TA 2022 sebesar Rp. 332.567.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) namun pada pertengahan tahun terkena pemotongan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa pagu anggaran untuk dukungan manajemen sebesar Rp. 252.567.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 252.567.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) (99,85%). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain :

- Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan, seperti Dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjajian Kinerja, dan Desain Penyelenggaraan SPIP.
- Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dalam satuan kerja, yaitu penjaminan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi.
- Penataan dan Pemindahan Arsip
- Pengusulan revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Pengusulan untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
- Update data pegawai melalui My SAPK.
- Uji coba pemakaian aplikasi SRIKANDI untuk pengurusan surat.
- Pengurusan administrasi kepegwaian, keuangan, pelayanan umum dan ketatausahaan.

Kegiatan layanan dukungan manajemen bersifat rutin dari tahun ke tahun, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan.

Layanan Perkantoran Direktorat PDLKWS

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Direktorat PDLKWS pada tahun 2022 dilakukan sepanjang tahun dan bersifat rutin antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja operasional lainnya, belanja barang persediaan barang konsumsi, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua/empat.

Layanan Sarana Internal Direktorat PDLKWS

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Direktorat PDLKWS pada tahun 2022 sebesar Rp. 468.500.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dan mendapatkan penambahan anggaran dua kali sehingga menjadi Rp. 1.053.500.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.052.846.181 (satu milyar lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau 99,94%.

Layanan Prasarana Umum Direktorat PDLKWS

Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin dari tahun ke tahun. Secara umum pelaksanaannya dapar berjalan dengan baik.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

Pada tahun 2022 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 8.393.394.000,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 4.450.294.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan PNP (PNBP) sebesar Rp. 3.943.100.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah). Dalam perkembangannya terdapat Blokir AA sebanyak 2 (dua) tahap dengan nilai total sebesar Rp. 1.528.500.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Terdapat revisi antar RO untuk mendukung penyelesaian Penyusunan Materi Teknis RPPLH Nasional sehingga terjadi perubahan pagu pada masing-masing RO tersebut. Kemudian terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersumber dari PNBP pada RO 6744.QMA.001 dan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) bersumber dari RM pada RO 5432.EBA.994.002.E (operasional dan pemeliharaan kantor Dit. PDLKWS) sehingga total pagu akhir sebesar Rp. 8.163.418.000,- (delapan milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupah). Realisasi anggaran Direktorat PDLKWS pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.151.677.576,- (Delapan milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 99,86% dari total anggaran tahun 2022. Secara rinci capaian serapan anggaran Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

NO/KODE	KEGIATAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
5436	**Pencegahan Dampak Lingkungan**			**6.857.351.000**	**6.846.633.002**	**99,84**
5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	7 Rekomendasi Kebijakan	1.532.500.000	1.532.103.099	99,97
5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	Rekomendasi kebijakan Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	2 Rekomendasi Kebijakan	647.021.000	646.150.951	99,87
5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Rekomendasi kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	299.900.000	294.383.029	98,16
5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan	327.930.000	326.941.237	99,70
5436.UBA.001	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Fasilitasi dan Pembinaan terlaksana sampai dengan penerbitan dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.000.000.000	3.997.058.496	99,93
6744.QMA.001	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Fasilitasi rapat koordinasi penyusunan draf-0 RPP -RPPLH	1 Laporan	50.000.000	49.996.200	99,99

NO/KODE	KEGIATAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
5432	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**			**1.306.067.000**	**1.305.044.574**	**99,92**
5432.EBA.962.058	Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Teknis (PDLKWS)	Layanan Perkantoran Dit. PDLKWS terlaksana	1 Layanan	252.567.000	252.198.393	99,85
5432.EBA.994.002.E	Operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan operasional dan pemeliharaan Dit. PDLKWS terlaksana	1 Layanan	1.053.500.000	1.052.846.181	99,94
	Total			**8.163.418.000**	**8.151.677.576**	**99,86**

Sumber : Direktorat PDLKWS

Sedangkan prognosis capaian pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 9 Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023

NO.	KODE RO	RO	TARGET	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	11 Rekomendasi Kebijakan	2.106.000.000	2.092.016.831	99,00
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	35 Rekomendasi Kebijakan	19.226.008.000	19.175.187.131	99,74
	051. Ekoregion	Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion		1.722.000.000	1.711.907.815	99,41
	052. D3TLH	Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH		17.504.008.000	17.463.279.316	99,77
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	2 Dokumen	960.000.000	948.684.596	98,82
4	5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	3 Peta	3.360.523.000	3.355.741.434	99,86
5	5436.QAH.004	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	65 Dokumen	8.604.813.000	8.414.465.166	97,79
6	5432.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1.226.400.000	1.222.759.45	99,70
7	5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	600.000.000	598.740.422	99,79
8	5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	33 Unit	219.200.000	217.184.000	99,08
9	5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1.418.400.00	1.417.433.000	99,93
		Total		**37.721.344.000**	**37.442.212.038**	**99,26**

Sumber : Direktorat PDLKWS

3

RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk periode tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian.

Adapun tema RKP tahun 2024 yakni mempercepat transpormasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunal infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sebagai suatu kebljakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan.

Dukungan Direktorat PDLKWS dalam Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Dokumen RPPLH
			Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion
			Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi
			Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tabel 3. 2 Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
029.FD- Program Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	74	PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*Enviromental Safeguard)*	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	Dokumen KLHS	40	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
							T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Dokumen	2	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
						T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*Enviromental Safeguard*)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	Dokumen	9	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
						T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan	22	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan
						T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Hektar	65	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Sumber : Direktorat PDLKWS

Penjabaran Program Kualitas Lingkungan Hidup di dalam kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan dituangkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi
2. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
3. Dokumen RPPLH
4. Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion
5. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL
6. Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)

C. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2024

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka perumusan output kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) dan Rincian Ouput (RO). Kerangka pendanaan belanja tahun 2023 Direktorat PDLKWS sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Kerangka Pendanaan

Kegiatan	KRO	RO	Target	Pagu (Rp)
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7 Rekomendasi Kebijakan	700.000
		005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1 Rekomendasi Kebijakan	1.430.000
		006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	440.000
		007-Sistem kajian dampak lingkungan dan system informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	170 Layanan	4.694.085
	QAH-Pelayanan Publik Lain	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	1 Layanan	1.219.350
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	20 Layanan	1.051.523
		002-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1 Layanan	9.136.000
		003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	22 Layanan	385.000
		004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	1.100.000
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813

Sumber : Direktorat PDLKWS

D. PENGUATAN BELANJA TAHUN 2024 (*BUDGET TAGGING*)

Untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, Direktorat PDLKWS dalam hal ini berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi. Penandaan anggaran di Direktorat PDLKWS terkait dengan perubahan iklim dan kegiatan yang responsif gender, seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 4 Penandaan Anggaran Terkait dengan Perubahan Iklim dan Kegiatan Responsif Gender

No	PENANDAAN		RO	ANGGARAN (Rp)
	PRIORITAS NASIONAL			
1	PN 6-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	40,700,000,000
		2	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	
		3	Dokumen RPPLH	
		4	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	
		5	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	
		6	Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)	
2	**TEMATIK**			
	Anggaran Responsif Gender	1	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	15,000,000,000
	Mitigasi perubahan Iklim	2	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	11,000,000,000
	Co-Benefit - Mitigasi perubahan Iklim dan Adaptasi perubahan iklim	1	Dokumen RPPLH	7,000,000,000
		2	Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)	

Sumber : Direktorat PDLKWS

4

PENUTUP

Rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2024 mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, RKP 2024 dan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2020-2024. Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024 dan DIPA TA. 2024 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2024.